

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sejarah

2.1.1 Pengertian Sejarah

Sejarah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, *syajaratun* yang berarti pohon. Dalam bahasa asalnya, istilah sejarah diungkapkan dengan *tarikh*, yang berarti waktu atau kurun terjadinya peristiwa. Menurut Lingder, istilah ini digunakan masyarakat nusantara atas dasar kebiasaan bangsa Arab (Baduy) menggunakan sejarah sebagai wahana mengukuhkan biografi seseorang atau rangkaian kekerabatan dalam keluarga yang bercabang-cabang seperti pohon (Tamburaka, 1999:21).

Dalam tradisi sebagian masyarakat nusantara, sejarah diistilahkan dengan *babad*, *tambo*, *hikayat* dan *riwayat*. *Babad* adalah sejenis teks Jawa dan Bali kuno yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, terutama menyangkut asal-usul. Dalam bahasa Jawa, *babad* memiliki arti literal menebang pohon atau hutan, yang juga bermakna membuka lahan baru sebagai pusat pemerintahan. Secara konseptual, sejarah pada dasarnya berkenaan dengan tiga aspek konseptual yang mendasarinya, yaitu konsep tentang perubahan, konsep waktu dan kontinuitas (Kartodirjo, 1993:14).

1. Konsep Perubahan

Sejarah adalah perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Meski demikian, hanya perubahan yang benar-benar memiliki makna penting bagi

kehidupan manusia yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa perubahan yang bernilai sejarah. Termasuk dalam kategori ini di antaranya perubahan rejim kolonial ke nasional, dari Soekarno ke Orde Baru, atau Orde Baru ke era demokratisasi (Tamburaka, 1999:28).

2. Konsep Waktu

Peristiwa sejarah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, bukan pula terjadi begitu saja tanpa sebab apapun. Setiap peristiwa yang terjadi di suatu waktu dapat dipastikan tidak berdiri sendiri saat peristiwa terjadi. Setiap peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu pasti ada kaitannya dengan waktu sebelum dan sesudahnya. Bila dirunut melalui penelaahan sejarah, sangat mungkin ditemukan keterkaitan suatu peristiwa dengan situasi atau peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya.

Terjadinya suatu peristiwa senantiasa dikarenakan oleh suatu sebab yang ada dalam alur waktu. Konteks hubungan sebab-akibat peristiwa yang menjadi akibat dengan peristiwa lain yang menjadi sebab ada dalam dimensi waktu. Dalam konteks tertentu waktu dapat pula menjadi sebab, meski tidak pernah benar-benar menjadi akibat.

3. Konsep Kontinuitas

Kehidupan manusia berada dalam rangkaian perubahan demi perubahan yang berkesinambungan. Perubahan demi perubahan tersebut tidak akan berhenti pada suatu titik peristiwa. Dalam konteks kekinian (*postmodern*) bahkan diyakini bahwa perubahan telah menjadi sesuatu yang pasti sebagaimana ungkapan ahli masa depan (*futurolog*), “Saat ini yang pasti adalah ketidakpastian dan yang tetap adalah perubahan.

Sebagian perubahan yang terjadi tentunya ada yang bermakna sangat dalam bagi manusia, tetapi sebagian lagi sangat boleh jadi tidak demikian. Kebermaknaan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kedekatan, hubungan, kepentingan atau dampak suatu perubahan terhadap manusia tertentu. Perubahan-perubahan tertentu yang menjadi momentum sejarah tertentu bahkan sangat mungkin mengubah kehidupan banyak orang.

Perubahan dari rejim kolonial ke nasional telah banyak mengubah nasib dan pola hidup masyarakat bekas jajahan. Perubahan dari pemerintahan demokrasi ke otoriter atau sebaliknya terbukti banyak mengubah nasib dan jalan hidup sekelompok manusia di suatu daerah atau negara. Dalam catatan sejarah, fenomena semacam ini dapat dicermati pada peristiwa kemenangan revolusi komunis di berbagai negara. Selain diwarnai dengan berbagai tindak kekerasan, penyiksaan bahkan pembunuhan, masa-masa selama pemerintahan komunis menyebabkan masyarakat dituntut untuk mengubah pola hidup, pola pikir, bahkan orientasi hidupnya. Demikian halnya pada saat rejim komunis tumbang di banyak negara, pola hidup dan pola hubungan dalam masyarakat dengan sendirinya juga berubah total (Kartodirjo, 1993:17).

2.1.2 Ruang Lingkup Sejarah

Kajian sejarah meliputi dua aspek, yakni aspek konsep sejarah dan aspek implementasinya dalam menganalisis persoalan-persoalan kesejarahan (kritik sejarah). Konsep sejarah menyajikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan

sebagai perangkat analisis dalam memahami persoalan kesejarahan, berupa konsep dasar, unsur-unsur dan metode sejarah. Kritik sejarah menelaah beberapa langkah-langkah dan hal-hal yang diperlukan dalam menelaah peristiwa kesejarahan hingga menghasilkan pengetahuan sejarah atau yang biasa diistilahkan dengan kebenaran sejarah (Tamburaka, 1999:33).

Penyusunan dan penelaahan sejarah dapat ditinjau dari berbagai skop yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Tinjauan terhadap dimensi-dimensi khusus dalam kesejarahan manusia biasa diistilahkan dengan unit sejarah, yaitu bagian pengetahuan mengenai kesejarahan manusia yang didasarkan atas satu kategori masalah, tema atau topik dalam *setting* waktu tertentu. Secara garis besar dimensi-dimensi tersebut dapat dipilahkan ke dalam dimensi ruang (spasial) dan sosio-kultural.

1. Dimensi Spasial

Dimensi ini menempatkan studi sejarah dalam konteks lokalitasnya, baik daerah, nasional, regional maupun internasional. Dimensi spasial sebuah peristiwa tidak hanya dilihat dari segi lokasi terjadinya peristiwa, tetapi juga pada luasnya dampak yang ditimbulkannya. Perang Diponegoro dan Perang Aceh tidak dapat dipandang sebagai peristiwa di pulau Jawa dan Aceh saja, tetapi juga peristiwa regional (Asia Tenggara). Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya dirasakan pula oleh masyarakat di kawasan Asia Tenggara khususnya, baik secara politik maupun ekonomi.

2. Dimensi Sosio-kultural

Skup penyelidikan sejarah atas dasar dimensi sosio-kultural pada umumnya berangkat dari penulisan sejarah yang berangkat dari suatu perspektif ilmu sosial dan humaniora. Termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah sejarah politik, sejarah perekonomian, sejarah sosial dan sejarah kebudayaan

2.1.3 Sumber Sejarah

Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan dan media untuk merekonstruksi dan menggambarkan peristiwa sejarah di masa lalu. Dengan demikian, rekonstruksi sejarah menyangkut dua aspek kegiatan, yakni meneliti atau menguji kebenaran informasi sejarah dan menuliskannya (Kartodirjo, 1993:22-27).

1. Rekonstruksi Peristiwa Sejarah

Sejarah bukan sekedar cerita sekalipun di dalamnya menceritakan peristiwa tertentu yang terjadi pada masa lalu. Sejarah memang lahir dari kebiasaan manusia bertutur, bercerita tentang suatu peristiwa, mengungkapkan perasaan, harapan, opini dan kebiasaan berkomunikasi pada umumnya. Penuturan dan penceritaan suatu peristiwa tentu saja tidak lepas dari berbagai maksud dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

Kurun waktu antara peristiwa -penutur/pencatat pertama- hingga ke sekian generasi paling mutakhir memungkinkan informasi mengalami penambahan atau pengurangan. Daya ingat, kemampuan berpikir kepribadian dan kepentingan penutur menuturkan sebuah informasi masa

lalu tak mungkin terhindarkan dalam mempengaruhi nuansa maupun substansi peristiwa. Akibatnya, satu peristiwa yang terjadi di masa lalu kadang hadir dalam beberapa versi yang berbeda ketika sampai pada manusia hari ini, bahkan tidak jarang saling bertolakbelakang.

Hal ini dikarenakan berbagai hal di luar peristiwa sejarah sangat potensial turut serta mempengaruhi versi, nuansa hingga substansi peristiwa aslinya. Gambaran peristiwa sebenarnya yang diperoleh manusia mutakhir sangat boleh jadi tidak utuh lagi atau berbeda sama sekali dari peristiwanya saat terjadi. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya informasi sejarah yang sampai pada manusia saat ini merupakan hasil olah (konstruksi) manusia, sejarawan serta konstruksi sejarah itu sendiri selama waktu bergulir. Sejarah yang paling orisinal adalah peristiwa sejarah itu sendiri. Hanya saja peristiwa tersebut tidak akan sampai pada manusia yang hidup dalam kurun sejarah jauh sesudahnya bilamana tidak melalui sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber asli sejarah sendiri belum tentu dapat diketahui, dibaca atau dipahami manusia saat ini tanpa jasa para sejarawan.

Salah satu kasus menarik adalah keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang besar dan populer di Indonesia. Hingga sejarawan mengungkapkannya dalam gambaran sejarah yang luas mengenai keberadaan kerajaan tersebut, masyarakat Palembang dan Indonesia pada umumnya kurang mengenal, tidak tahu bahwa di daerah tersebut pernah berdiri kerajaan besar pada masanya. Situs-situs kerajaan yang tersisa tidak banyak diketahui

masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Kita baru tahu bahwa di daerah tersebut pernah ada kerajaan maritim besar setelah para sejarawan merekonstruksi sejarah kerajaan Sriwijaya berdasarkan situs-situs dan prasasti yang ditinggalkan serta mengumpulkan catatan-catatan para pelancong dan pedagang Cina dan India.

Proses rekonstruksi tersebut tentu saja mengandung beberapa kemungkinan. Rekonstruksi sejarah kemungkinan menghasilkan gambaran yang tepat sebagaimana peristiwa aslinya, tetapi bukan mustahil terjadi penambahan atau pengurangan. Hal ini dikarenakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu sangat terbatas. Apalagi di daerah-daerah yang tradisi tulisannya relatif kecil, atau bahkan sumber-sumber tulisan nyaris tidak ada, seperti sebagian benua Afrika, Amerika dan Australia, bertutur secara lisan merupakan sumber utama informasi mengenai masa lalu. Penuturan masa lalu dalam tradisi lisan pada umumnya tidak dapat menghindarkan diri dari mitos, legenda dan berbagai kepentingan kelompok.

Di daerah yang memiliki tradisi tulis yang relatif kuat sekalipun rekaman yang dapat diperoleh berkenaan dengan peristiwa masa lalu sebenarnya tetap saja terbatas. Pada masa lalu pada umumnya hanya sebagian orang saja yang mampu menulis dan berkemauan merekam peristiwa dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan yang tersedia juga cenderung didominasi penulis dari komunitas atau kelompok sesuai dengan versi masing-masing. Bila dibandingkan dengan perkembangan saat ini, rekaman peristiwa jauh

lebih banyak dan lebih luas, terutama dikarenakan media komunikasi dan informasi begitu luas tersebar bahkan mendominasi alam pikiran manusia.

Munculnya versi yang beraneka ragam dari berbagai media memang tidak terhindarkan, namun perbedaan bahkan pertentangan yang terjadi dalam pemberitaan dengan sendirinya memberikan kritik perekaman peristiwa bagi mereka yang suatu saat nanti bermaksud mengkaji sejarah pada periode sekarang. Informasi tentang suatu peristiwa yang didasarkan atas satu versi informasi sudah barang tentu tidak memadai untuk dijadikan sumber informasi sejarah. Informasi mengenai suatu peristiwa yang dibumbui mitos, legenda atau kepentingan tertentu barangkali saja tetap bermanfaat dalam mengokohkan suatu ide, tradisi atau keyakinan tertentu, tetapi tidak demikian halnya dengan maksud dan tujuan utama sejarah, yakni menangkap makna peristiwa berdasarkan atas pemahaman masalah secara apa adanya.

Informasi mengenai masa lampau digali sejarawan dari berbagai sumber, seperti catatan yang ditulis atau dicetak, mata uang atau benda bersejarah lainnya, bangunan dan monumen, serta dari wawancara dengan pelaku atau pewaris sejarah. Ada banyak alasan mengapa orang menyimpan dan menjaga catatan sejarah. Di antara alasan tersebut adalah alasan administratif (misalnya: keperluan sensus, catatan pajak, dan catatan perdagangan), alasan politis (guna memberi pujian atau kritik pada pemimpin negara, politikus, atau orang-orang penting), alasan keagamaan, kesenian, pencapaian olah raga (misalnya: rekor olimpiade), catatan

keturunan (genealogi), catatan pribadi (misalnya surat-menyurat), dan hiburan. Sedangkan untuk sejarah moderen, sumber-sumber informasinya adalah: foto, gambar bergerak (film, audio, dan rekaman video).

Tidak semua sumber tersebut dapat digunakan untuk penelitian sejarah, karena bergantung pada periode yang hendak diteliti atau dipelajari. Selain itu, berbagai sumber tersebut perlu dikaji kembali agar diperoleh gambaran yang meyakinkan mengenai suatu peristiwa masa lalu berikut situasi yang melingkupi. Wawancara kadang masih diperlukan meski pola ini termasuk ke dalam “sejarah penceritaan”, atau oral history. Masing-masing sumber tadi nantinya dapat dirangkai menjadi sebuah bangunan data dan informasi yang utuh, saling melengkapi, dan bila perlu saling mengoreksi. Dalam hal ini penelitian sejarah bergantung pada historiografi, atau cara pandang sejarah, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

2. Klasifikasi Sumber Sejarah

Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai media dan bahan merekonstruksi dan menggambarkan peristiwa masa lalu. Sumber tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tujuan, dan originalitasnya (Tamburaka, 1999:48-50).

a. Berdasarkan bentuk atau wujudnya

- 1) Sumber visual, yakni sumber sejarah yang berwujud dan berbentuk yang dapat membantu menjelaskan suatu peristiwa, adanya aktivitas dan kreativitas manusia di masa lalu. Termasuk dalam kategori sumber visual adalah situs candi, istana, masjid, benteng dan benda-benda purbakala lainnya.

2) Sumber atau warisan atau lisan, yaitu sumber informasi sejarah yang berasal dari penuturan dari mulut ke mulut. Sumber lisan dipilah menjadi dua tradisi lisan dan sejarah lisan.

a) Tradisi lisan (*oral tradition*), yakni tradisi, adat istiadat atau kepercayaan yang disampaikan melalui ungkapan lisan.

b) Sejarah lisan (*oral history*) yaitu penuturan mengenai peristiwa masa lalu yang disampaikan secara lisan. Sumber sejarah lisan dapat dibedakan menjadi dua sumber lisan yaitu sumber lisan dan tradisi dan sumber lisan berdasarkan penuturan pelaku sejarah. Sumber lisan yang berasal dari tradisi lisan yang disampaikan secara turun-temurun. Termasuk dalam kategori ini adalah mitos, legenda dan hikayat tentang seorang tokoh atau peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Adapun sumber lisan berdasarkan penuturan pelaku sejarah.

3) Sumber tertulis

a) Dibuat dengan sengaja

Termasuk ke dalam sumber tulisan yang disengaja adalah sumber sejarah tradisional atau historiografi tradisional; catatan pribadi; dokumen arsip; buku peringatan; resolusi, petisi atau usul; biografi atau otobiografi; dan berita surat kabar. Di antara sumber sejarah tradisional adalah Negara Kertagama, Pararaton dan Babad. Penulisan sejarah tradisional biasanya memiliki karakteristik annal, yakni berdasarkan angka tahun. Karakteristik

kronik, yakni secara berurutan berdasarkan waktu terjadinya peristiwa.

b) Dibuat dengan tidak sengaja

Termasuk ke dalam sumber tulisan yang dibuat dengan tidak disengaja adalah sumber instruksi raja, pembukuan, berita pemerintah, perpustakaan, kuitansi dan sebagainya.

b. Berdasarkan asal-usulnya

- 1) Dari dalam negeri, yakni sumber sejarah yang dibuat, berasal dan berada di dalam negeri Indonesia sendiri.
- 2) Dari luar negeri, yakni sumber sejarah yang diperoleh berdasarkan rekaman atau laporan pelancong asing yang pernah singgah ke suatu negara.

c. Berdasarkan otentisitas atau keasliannya

- 1) Sumber original atau autentik, yakni sumber informasi sejarah yang benar-benar dihasilkan oleh tangan pertama, yang dikeluarkan pada jamannya. Termasuk dalam hal ini adalah naskah proklamasi 1945 dan buku Negara Kertagama.
- 2) Sumber asli, yakni sumber yang berasal dari penggandaan sumber otentik, misalnya salinan naskah proklamasi yang semula ditulis tangan oleh Soekarno kemudian disalin dalam ketikan dan copian yang disebarluaskan ke masyarakat.
- 3) Sumber turunan, yakni sumber informasi sejarah yang diambil berdasarkan turunannya dengan cara menyalin atau mereproduksi kembali. Derajat kesejarahan sumber turunan sudah barang tentu

lebih rendah dibanding dua jenis sebelumnya, dikarenakan adanya beberapa kelemahan, berupa: ketelitian penyalin, kerusakan tulisan akibat rentang waktu, serta perbedaan bahasa akibat penerjemahan ataupun perkembangan bahasa jaman dari waktu ke waktu.

- 4) Sumber dipalsukan, yakni sumber sejarah yang dengan sengaja diubah atau bahkan diganti sama sekali oleh seseorang demi tujuan tertentu.

Pemilahan sumber sejarah menurut Tamburaka, (1999:48-50) juga dilakukan dengan kategorisasi kedalam sumber primer, sekunder dan tersier.

- 1) Sumber primer adalah sumber sejarah yang memiliki nilai original atau autentik, yang dibuat oleh tangan pertama. Termasuk dalam sumber primer adalah keterangan pelaku sejarah atas suatu peristiwa sejarah tertentu.
- 2) Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang dihasilkan oleh orang sejaman dengan terjadinya suatu peristiwa. Termasuk kedalam sumber sekunder adalah catatan pengamat atau orang yang menjadi saksi peristiwa tetapi bukan termasuk pelaku dalam suatu peristiwa. Peristiwa tersebut biasanya terdokumentasikan dalam bentuk memorar atau hasil penelitian.
- 3) Sumber tersier adalah sumber sejarah yang merupakan turunan dari sumber pertama atau kedua, yang karena bobot informasinya kemudian disalin atau dirujuk sebagai referensi sebuah karya ilmiah. Termasuk dalam hal ini adalah karya-karya ilmiah yang membahas peristiwa masa

lalu yang menjadikan beberapa karya otentik dan sekunder sebagai bahan rujukan.

3. Cara Mengumpulkan Sumber

Pengumpulan sumber sejarah atau heuristik perlu dilakukan secara selektif dan cermat. Beragamnya sumber dan kualitas kandungan informasi kesejarahan yang dikandung sebuah sumber sejarah mengharuskan sejarawan tidak hanya berusaha membedakan antara sumber original, asli atau palsu, tetapi juga membedakan antara informasi dan opini, antara berita dan hasil interpretasi. Untuk menjaga objektivitas sejarah, terdapat beberapa langkah heuristik yang perlu dilakukan: (a) menentukan tema, topik atau pokok persoalan. Luasnya bidang persoalan kesejarahan mengharuskan sejarawan membatasi bidang kajiannya pada tema yang spesifik, (b) menginventarisir sumber, (c) mengumpulkan sumber yang relevan, dan (d) mengklasifikasikan sumber.

Untuk saat ini terdapat beberapa tempat yang dapat membantu sejarawan melakukan tugas heuristik, yakni (a) museum yang menyediakan koleksi sumber visual, (b) arsip yang menyediakan sumber tertulis, (c) koleksi-koleksi pribadi yang menyediakan beragam sumber, dan (d) situs bersejarah yang menyediakan sumber pada tempat peristiwa. Selain itu, publikasi hasil heuristik diperlukan dalam rangka membuka sharing informasi dan hasil analisis analisis seorang sejarawan dengan publik, khususnya antar sejarawan. Ini memungkinkan hadirnya kritik eksternal yang potensial kian meningkatkan kualitas heuristik.

2.1.4 Sejarah dalam Konteks Pendidikan

Menurut Hyndrawati (2011) makna pendidikan secara sederhana dapat di artikan sebagai usaha manusia untuk membina jati dirinya, membina jati dirinya itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaanya. sekalipun dalam keadaan sederhana peradaban manusia dan masyarakat di dalamnya mengandung terjadinya proses pendidikan dari pengalaman-pengalaman dalam proses pendidikan, akan tumbuh perkembangan dan perubahan hidup serta kehidupan baik secara personal maupun sosial. Oleh karenanya, kehidupan manusia memiliki dua dimensi yaitu dimensi personal dan dimensi sosial. Dimensi kehidupan sosial antara lain kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara kehidupan bermasyarakat terbentuk secara alami yang bersendikan faktor lingkungan (faktor geografid dan alam serta sosial) kehidupan berbangsa dan bernegara dibentuk oleh fator sejarah (faktor internal dan eksternal) suatu bangsa yang pernah dijajah lebih disebabkan faktor eksternal seperti bangsa dan negara republik Indonesia.([http:// disdikjabar.blogspot.com](http://disdikjabar.blogspot.com))

Keutuhan suatu bangsa dan negara terletak pada kekuatan dan kelemahan integrasi nasional apabila integrasi nasional lemah maka bangsa dan negara itu cepat atau lambat akan mengalami keruntuhan. Dalam hal ini pendidikan sejarah amat penting bagi generasi sekarang khususnya, para peserta didik dari tingkat dasar hingga menengah bahkan tingkat perguruan tinggi sekalipun pendidikan sejarah mutlak harus diberikan pada tingkat persekolahan. Dengan pendidikan sejarah diharapkan generasi sekarang, khususnya pesertya didik mampu memahami dan mengenal dirinya sendiri dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu (generasi terdahulu). Mereka diharapkan memahami masa

lampaunya, masa kekinianya, dan mampu meneropong kemasa yang akan datang dengan modal pemahaman terhadap masa lampau dan masa kini untuk berpijak pada masa depan yang cerah (Hyndrawati, 2011).

Pendidikan sejarah merupakan salah satu wahana untuk pembentukan karakter dan jati diri bangsa, kami kira, sudah menjadi pengetahuan umum. Dari pendidikan sejarah diajarkan tentang proses terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang membedakannya dengan negara-negara bangsa lainnya di dunia. Dari pendidikan sejarah pula diajarkan tentang asal-usul bangsa Indonesia dan perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka, maju, sejahtera, dan terhormat dalam pergaulan antarbangsa (Suwirta dan Rosdiyanti, 2013).

Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, Presiden Soekarno (1945-1966) dan Presiden Soeharto (1966-1998) adalah pemimpin-pemimpin yang menyadari tentang pentingnya pendidikan sejarah sebagai wahana pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Presiden Soekarno, misalnya, terkenal dengan ungkapan tentang JASMERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah). Sementara Presiden Soeharto, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah menghasilkan buku standar *SNI (Sejarah Nasional Indonesia)* yang dijadikan rujukan dalam proses pendidikan sejarah di Indonesia. Agenda besar bangsa ini adalah masalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Bagaimana pendidikan dan kurikulum sejarah yang terintegrasi dirancang; untuk memberikan pendidikan dalam rangka membentuk karakter bangsa (Suwirta dan Rosdiyanti, 2013).

2.2 Konsep Nilai Sosial

2.2.1 Pengertian Nilai Sosial

Nilai adalah prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengandung unsur peradaban manusia yang objektif, tinggi (luhur) dan terdapat dalam citra-citra kongkrit. Nilai merupakan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai sosial yang perlu kita indahkan (Poerwadarminta, 1985:619).

Sementara itu menurut Hendropuspito (1989:203), secara umum nilai dapat dipilah menjadi dua bagian yang saling berkontradiksi, misalnya nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah, positif dan negatif dan seterusnya. Nilai dapat melekat pada apapun, misalnya nilai sosial, nilai kultural, nilai historis dan nilai religius.

Menurut Mulyadi dan Posman Simanjuntak (1988:7), nilai sosial adalah sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar untuk merumuskan sesuatu yang benar dan penting. Nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan hidup bersama.

Dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia tidak pernah lepas hubungannya dengan manusia lain. Dan hubungan atau interaksinya dengan manusia lain inilah, muncul nilai-nilai tertentu yang biasanya sesuai dengan konvensi yang ada.

Menurut Anwar dalam Yuniarti (1996:37), nilai sosial adalah gambaran mengenai sesuatu yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang dianggap benar atau salah yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut.

Lebih lanjut Anwar dalam Yuniarti (1996:37) dalam yuniarti menegaskan bahwa nilai sosial mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat. Hal ini disebabkan nilai-nilai sosial tersebut erat hubungannya dengan kebudayaan dan masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu mengenai sesuatu. Bahkan, kebudayaan suatu masyarakat dianggap memiliki nilai-nilai yang tidak terhingga bagi orang-orang yang memilikinya. Kuntjaraningrat (1993:38), mengemukakan bahwa sistem nilai terdiri atas konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, ataupun tentang hal-hal yang dianggap amat bernilai dalam hidupnya. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, konsep kelima masalah pokok yang menentukan orientasi nilai budaya tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Masalah hakikat hidup manusia (MH), yaitu bagaimana manusia memandang hakikat hidup ini, masalah-masalah yang menimpa atau dialami, serta apa dan bagaimana hidup manusia. Nilai sosial terhadap masalah ini meliputi: (a) hidup itu buruk, (a) hidup itu baik, (a) hidup itu buruk tetapi manusia wajib berikhtiar agar hidup menjadi lebih baik.
- b. Masalah hakikat karya manusia (MK), yaitu bagaimana manusia memandang hakikat karya atau hasil usaha yang bersifat material atau immaterial. Nilai sosial terhadap masalah ini meliputi (a) karya untuk nafkah hidup (b) karya untuk kehormatan dan kedudukan dan (c) karya untuk menambah karya.

- c. Masalah hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW), yaitu persepsi manusia tentang waktu. Nilai sosial pada masalah ini meliputi (a) orientasi ke masa kini (b) orientasi ke masa lalu dan (c) orientasi ke masa depan.
- d. Masalah hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar (MA), yaitu bagaimana manusia memandang alam. Nilai sosial terhadap masalah ini meliputi (a) manusia tunduk kepada alam (b) manusia berusaha menguasai alam dan (c) manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam.
- e. Masalah hakikat hubungan manusia dengan manusia (MM), yaitu orientasi masyarakat tentang bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya. Nilai sosial mengenai masalah ini meliputi (a) rasa ketergantungan kepada sesama atau gotong royong, (b) rasa ketergantungan kepada atasannya, dan (c) meniali tinggi atas kekuatan diri sendiri atau individualisme.

Berdasarkan penjelasan orientasi nilai budaya tersebut, Anwar dalam Yuniarti (1996:39), maka nilai-nilai sosial yang harus diperhatikan adalah:

1. Manusia dalam hidupnya perlu berikhtiar menurut kemampuannya
2. Manusia perlu mengembangkan karya untuk nafkah hidup
3. Manusia perlu berorientasi ke masa depan berdasarkan masa lalu dan masa kini
4. Manusia perlu menjaga keselarasan dengan alam sekitarnya
5. Manusia perlu berorientasi kepada kekuatan sendiri tanpa meninggalkan sifat kegotong royongan dan ketergantungan.

2.2.2 Ciri-Ciri Nilai Sosial

Menurut D.A. Wila Huky (1982) dalam Abdulsyani (2002 :50-51), ciri-ciri nilai sosial adalah :

1. Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi di antara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir.
2. Nilai sosial ditularkan. Nilai yang menyusun sistem nilai ditentukan dan teruskan di antara anggota-anggota. Nilai ini dapat diteruskan dan ditularkan dari suatu grup ke grup lain dalam suatu masyarakat melalui berbagai macam proses sosial, dan dari satu masyarakat serta kebudayaan ke yang lainnya melalui akulturasi, defusi dan sebagainya.
3. Nilai dipelajari. Nilai dicapai dan bukan bawaan lahir. Proses belajar dan pencapaian nilai-nilai itu, dimulai sejak masa kanak-kanak dalam keluarga melalui sosialisasi.
4. Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang dan yang telah diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi atau grup dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai juga membantu masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa suatu sistem nilai, masyarakat akan menjadi kacau. Oleh karena itu, sistem nilai sosial dipandang penting oleh masyarakat, khususnva untuk pemeliharaan kemakmuran dan kepuasan sosial.

5. Nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak di mana terdapat konsensus sosial tentang harga relatif dari obyek dalam masyarakat. Nilai-nilai secara konseptual merupakan abstraksi dari unsur-unsur nilai dan macam obyek.
6. Nilai cenderung berkaitan satu dengan yang lain secara komunal untuk membentuk pola-pola dan sistem nilai dalam masyarakat. Bila tidak terdapat keharmonisan yang integral dari nilai-nilai sosial, akan timbul problem sosial.
7. Sistem-sistem nilai bervariasi antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain, sesuai dengan harga relatif yang diperlihatkan oleh setiap kebudayaan terhadap pola-pola aktivitas dan tujuan serta sasarannya. Dengan kata lain, keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda, menghasilkan sistem-sistem nilai yang saling berbeda.
8. Nilai selalu menggambarkan alternatif dan sistem-sistem nilai yang terdiri dari struktur rangking alternatif-alternatif itu sendiri, sehingga saling menyempurnakan dan mengisi, dalam menentukan rangking dari posisi atau level dari obyek-obyek yang ada.
9. Masing-masing nilai dapat mempunyai efek yang berbeda terhadap orang-perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan.
10. Nilai-nilai juga melibatkan emosi dan dapat mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun secara negatif.

2.2.3 Fungsi Umum Nilai Sosial

Menurut Huky dalam Abdulsyani (2002 :53-54), ada beberapa fungsi umum dari nilai-nilai sosial, yaitu:

- a. Nilai-nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan harga sosial dari pribadi dan grup. Nilai-nilai ini memungkinkan sistem stratifikasi secara menyeluruh yang ada pada setiap masyarakat. Mereka membantu orang perorangan untuk mengetahui di mana ia berdiri di depan sesamanya dalam lingkup tertentu.
- b. Cara-cara berpikir dan bertingkah laku secara ideal dalam sejumlah masyarakat diarahkan atau dibentuk oleh nilai-nilai. Hal ini terjadi karena anggota masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan bertingkah laku yang terbaik, dan ini sangat mempengaruhi dirinya sendiri.
- c. Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Mereka menciptakan minat dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan apa yang diminta dan diharapkan oleh peranan-peranannya menuju tercapainya sasaran-sasaran masyarakat.
- d. Nilai-nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu. Mereka mendorong, menuntun dan kadang-kadang menekan manusia untuk berbuat yang baik. Nilai-nilai menimbulkan perasaan bersalah yang cukup

2.2.4 Nilai Sosial-Nilai Sosial dalam Konteks Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, "Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab", pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara

optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tidak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah sosialnya.

Nilai sosial, yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari lingkungan terdekat, berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu nilai sosial budaya nasional bangsa dan universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing terhadap nilai sosial dia tidak mengenal dengan baik nilai sosial budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota sosial budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan (*valueing*). Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai-nilai sosial nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan (Juwarti, 2012:51).

Proses pengembangan nilai-nilai sosial bangsa ini dilakukan melalui berbagai mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting yaitu mata pelajaran IPS. Melalui pelajaran ini dapat mengembangkan kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting. Kesadaran tersebut dapat terbangun melalui pemberian pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri bangsanya di masa lalu yang menghasilkan dirinya dan bangsanya di masa kini. Selain itu harus membangun pula kesadaran, pengetahuan, wawasan, dan nilai berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup, nilai yang hidup di masyarakat, sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang,

sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan. Melalui pembelajaran yang demikian, nilai-nilai bangsa yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia. Pendidikan nilai-nilai sosial bangsa ini dilakukan melalui pengenalan, pelaksanaan, pemberian contoh nilai-nilai-nilai sosial yang menjadi dasar budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari pandangan hidup, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Fungsi nilai-nilai sosial bangsa adalah :

1. Pengembangan

Mengembangkan peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku nilai-nilai sosial bangsa agar lebih terbentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial bangsa

2. Perbaikan

Dilakukan untuk memperkuat sikap peserta didik dalam mengembangkan peserta didik yang lebih baik

3. Penyaring

Untuk dapat memilah dan menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya-budaya asing yang masuk yang tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia.

Tujuan nilai-nilai sosial bangsa adalah :

1. Menyadarkan peserta didik akan pentingnya nilai-nilai sosial bangsa dalam kehidupan sehari-hari
2. Mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai sosial bangsa yang sesuai

3. Menanamkan jiwa tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa
4. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (Juwarti, 2012:53-54).

Pada prinsipnya pembentukan nilai-nilai sosial tidak masuk ke dalam pokok bahasan, tetapi pembentukan nilai-nilai sosial bangsa diintegrasikan ke dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, pengembangan diri, dan lingkungan budaya sekolah. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pembentukan nilai-nilai sosial bangsa digunakan agar peserta didik dapat mengenal, memahami, dan menerapkan nilai-nilai sosial bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, peserta didik dapat memahami bahwa nilai-nilai sosial bangsa tersebut adalah miliknya dan mengharuskan mereka untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pilih. Selanjutnya peserta didik akan melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk dapat melihat dirinya sendiri sebagai makhluk sosial. Berikut ini prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan nilai-nilai sosial bangsa:

1. Berkelanjutan

Proses dalam pembentukan nilai-nilai sosial bangsa terhadap peserta didik mengalami proses yang panjang yakni dari awal peserta didik masuk ke dalam dunia pendidikan sampai selesai dari satuan pendidikan. Sebenarnya proses ini dimulai sejak peserta didik masuk ke kelas 1 sekolah dasar atau sejak tahun

pertama sampai lulus dari satuan pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya proses tersebut dilanjutkan pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi.

2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah
Sebenarnya pembentukan nilai-nilai sosial bangsa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya bangsa yang telah ditetapkan dalam Standar Isi (SI). Akan tetapi, mata pelajaran IPS lebih berpengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai sosial bangsa terhadap peserta didik, oleh karenanya nilai-nilai sosial bangsa lebih banyak diintegrasikan dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan
Nilai-nilai sosial bangsa bukan bahan ajar biasa yang dijadikan pokok bahasan yang diajarkan secara teori, konsep, proses, ataupun fakta-fakta. Materi pelajaran yang diberikan digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai-nilai sosial.
4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan
Pembentukan nilai-nilai sosial bangsa melalui integrasi ke dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dilakukan dengan menciptakan suasana menyenangkan dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran.

Indikator nilai-nilai sosial dalam pengajaran IPS di Sekolah meliputi kriteria untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku untuk nilai tertentu telah menjadi perilaku yang dimiliki seseorang. Berikut indikator pembelajaran yang mengembangkan nilai-nilai sosial:

1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

5. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

6. Demokratis

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

7. Semangat kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

8. Cinta tanah air

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

9. Peduli sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan

10. Tanggung jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Juwarti, 2012:78).

2.3 Tinjauan tentang Nilai Kejuangan

2.3.1 Pengertian

Menurut Suryopranoto (2011:3-6) nilai-nilai kejuangan seperti semangat kebersamaan, semangat rela berkorban dan semangat pantang menyerah merupakan nilai-nilai yang relevan untuk dipertahankan. Nilai kejuangan merupakan konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Dalam sejarah Indonesia nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Jaman sekarang perjuangan diletakkan pada membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, penurunan kualitas mental/moral.

Menurut Zen (2012:22) secara teoritis, sistem nilai budaya bangsa merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai apa yang harus dianggap berguna, tetapi juga mengenai apa yang dapat dianggap remeh dan tak berguna yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Musyawarah Nasional ke XI pada tanggal 24 Mei 2001 di Jakarta, mendefinisikan Nilai sebagai suatu penyifatan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektipan yang mempengaruhi tingkah laku. Proklamasi Kemerdekaan dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Nilai Dasar kejuangan, mengandung nilai-nilai yang dianggap penting dan berharga bagi masyarakat Indonesia dan berfungsi sebagai suatu pedoman dan pendorong perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai kejuangan adalah Nilai-nilai 45 yang diabadikan dalam sejarah kejuangan Bangsa Indonesia, sebagai landasan, kekuatan dan daya dorong Bangsa Indonesia yang telah mencapai titik kulminasi perjuangannya untuk melakukan revolusi serta memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Azas kejuangan diwujudkan pula dalam azas pembangunan Nasional, karena membangun itu merupakan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita mengisi Kemerdekaan dan mencapai tujuan nasional. Mencapai cita-cita nasional tersebut selalu dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan yang dapat diatasi dengan semangat kejuangan yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Jiwa, semangat dan nilai-nilai 45, sebagai Nilai kejuangan (NKBI) perlu dibudayakan kepada

generasi muda, karena mereka adalah generasi penerus harapan bangsa yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita luhur perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan (Zen, 2012:43).

2.3.2 Rumusan Nilai Kejuangan

Jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 adalah merupakan nilai kejuangan, karena tujuan perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya yaitu dengan diproklamasikannya Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi tertinggi perjuangan bangsa Indonesia yang dicapai secara gemilang dan hanya terjadi satukali saja dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia (Zen, 2012:61).

Jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan merupakan akumulasi nilai-nilai kejuangan dari masa ke masa dan tidak terjadi dalam waktu seketika. Nilai kejuangan dapat dirinci menjadi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Dasar

Nilai dasar adalah azas-azas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak dan lestari serta perlu dilestarikan. Nilai-nilai Dasar merupakan perwujudan sistem nilai budaya luhur yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan merupakan kekuatan moral spiritual Bangsa Indonesia dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Zen, 2012:77).

2. Nilai Operasional

Nilai operasional adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya dalam bentuk norma hukum atau norma sosial. Sifatnya dinamis dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai-nilai operasional ini lahir dan berkembang dalam perjuangan Bangsa Indonesia selama ini sebagai dasar yang kokoh dan daya dorong mental spritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan Bangsa Indonesia, seterusnya untuk mencapai Tujuan Nasional, serta untuk mempertahankan dan mengamankan semua hasil yang telah tercapai dalam perjuangan tersebut. Nilai-Nilai operasional pada masa mengisi kemerdekaan ini secara kuantitatif dapat bertambah dan secara kualitatif akan terjadi perubahan-perubahan sesuai tuntutan reformasi dan dinamika serta kualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuh belas nilai ini pada awal perumusannya, adalah kenangan pada angka keramat dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai-Nilai operasional ini terdiri dari:

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Jiwa dan Semangat Merdeka.
- 3) Nasionalisme
- 4) Patriotisme.
- 5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka.
- 6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah.
- 7) Persatuan dan Kesatuan
- 8) Anti penjajah dan penjajahan.

- 9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kekuatan dan kemampuan sendiri.
- 10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya.
- 11) Idealisme kejuangan yang tinggi.
- 12) Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara.
- 13) Kepahlawanan
- 14) Sepi ing pamrih rame ing gawe.
- 15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.
- 16) Disiplin yang tinggi.
- 17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (Pedoman JSN-45, 1988)

Nilai Kejuangan lahir dan berkembang dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia selama ini, terutama nilai-nilai dasarnya akan tetap lestari dan perlu dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai operasional dapat bertambah secara kuantitatif, dan pada tahap tahap perjuangan selanjutnya secara kualitatif akan terjadi perkembangan dalam pengamalannya sesuai fokus, intensitas dan validitasnya. Jiwa dan semangat merdeka dalam masa perjuangan fisik perang kemerdekaan, intensitasnya sangat tinggi, sehingga jiwa merdeka ini bergelora menjadi semangat merdeka yang secara bergelora dikumandangkan para pejuang kemerdekaan sejak kebangkitan Nasional seabad yang lampau. Semangat merdeka ini telah mendorong berkembangnya dan memperkuat nilai-nilai kejuangan yang sudah ada pada masa kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Pada tahap-tahap

perjuangan selanjutnya , jiwa dan semangat merdeka telah berubah intensitasnya (Zen, 2012:61).

Nilai ini tidak lagi berupa semangat merdeka akan tetapi berupa Jiwa Merdeka yang hidup dalam sanubari generasi Angkatan 08, Angkatan 28 dan Angkatan 45 serta generasi penerus kejuangan bangsa hingga dewasa ini. Jiwa, Semangat dan Nilai kejuangan telah menjadi landasan, kekuatan yang mendorong Bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankannya. Semangat merdeka tetap valid dalam tahap mengisi kemerdekaan, namun validitasnya menurun dimana semangat merdeka ini tidak lagi menempati kedudukan tertinggi dalam sanubari Bangsa Indonesia (Zen, 2012:63).

Fokus perhatian Bangsa Indonesia mulai beralih kepada semangat membangun untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa dalam satu tahap perjuangan saja, sebuah nilai operasional dapat mengalami perubahan dalam fokus, intensitas dan validasinya. Generasi penerus merupakan pejuang-pejuang penerus, pembela dan pengisi Kemerdekaan yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan turut mengamalkan serta melestarikan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45 sebagai nilai kejuangan. Generasi Angkatan 45 sebagai kekuatan moral bersama-sama generasi penerus mempunyai misi penting untuk melaksanakan kaderisasi regenerasi secara sembiosis dan berkesinambungan dalam rangka menegakan dan membina potensi demi kelestarian nilai kejuangan. Jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 sebagai nilai kejuangan perlu dilestarikan dan dibudayakan agar tetap hidup sebagai dasar

perjuangan bangsa mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, sekalipun orientasi perjuangan berubah sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia. Dewasa ini nilai kejuangan, dihadapkan pada rendahnya kemampuan membangun kesadaran kebangsaan dan kemampuan membangun semangat persatuan dan kesatuan sebagai dasar moral perjuangan yang tidak pernah berakhir dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zen, 2012:70).

2.3.3 Nilai Kejuangan Sebagai Perekat Negara Kesatuan.

Nilai kejuangan merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mencapai tujuan nasional bukanlah merupakan hal mudah, bilamana bangsa Indonesia tidak mempunyai cara pandang yang sama tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia dalam menuju tujuan Nasionalnya harus memiliki satu kesatuan pandangan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan Nasional. Pakaian kita boleh beraneka warna, namun tujuan harus pada satu sasaran yang sama yaitu pada pencapaian Tujuan Nasional. Berbagai ancaman, tantangan hambatan dan gangguan selalu menghadang terhadap delapan aspek (asta-gatra) kehidupan nasional, yaitu: aspek alamiah berupa situasi geografi negara kita, kekayaan alam dan kemampuan penduduk (tri-gatra) dan beberapa aspek kemasyarakatannya (pancagatra), berupa; ideologi bangsa, politik nasional, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya masyarakat dan pertahanan keamanan negara. Berlandaskan kekuatan yang didorong oleh Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45 sebagai Nilai kejuangan dapat menjadi perekat

memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju Tujuan Nasionalnya (Zen, 2012:111).

2.3.4 Nilai Kejuangan dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Masa sebelum pergerakan nasional diwarnai dengan kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, masuknya berbagai agama, dan disusul kedatangan bangsa-bangsa Barat. Terjadi pertemuan dan percampuran budaya di antara para pedagang asing dengan penduduk Nusantara, dan ini menjadi awal mula adanya semangat kebangsaan yang tumbuh dari kesadaran akan harga diri, ketakwaan pada Tuhan, kerukunan hidup antar-umat beragama, kepeloporan, dan keberanian. Kedatangan bangsa asing yang semula hanya berdagang rempah-rempah, berubah menjadi niatan untuk menguasai Nusantara. Timbullah perlawanan-perlawanan yang bersifat sporadis, sehingga mudah dipatahkan dengan politik *divide et impera*, dan penjajahan pun semakin mencengkeramkan kekuasaannya di Nusantara. Perlawanan yang tercerai-berai itu kemudian membangunkan jiwa merdeka, rasa harga diri yang tidak mau dijajah, semangat untuk merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Masa yang disebut 'Pergerakan Nasional' ini ditandai proses keruntuhan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan perlawanan bersenjata oleh kerajaan-kerajaan itu (Soeyono dan Nurliana, 2003:77).

Memasuki abad ke-20, perlawanan bersenjata beralih ke perjuangan di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya; tahapan ini dikenal sebagai 'Kebangkitan Nasional' yang ditandai maraknya organisasi pemuda dan partai-partai yang melawan penjajah lewat upaya mencerdaskan bangsa serta menanamkan tekad, solidaritas, harga diri, kebersamaan menuju persatuan dan

kesatuan. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tahun 1928 sebagai kebulatan tekad mempersatukan bangsa yang menjurus ke kemerdekaan dan kedaulatan: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Pada masa ini rasa kebangsaan mencuat karena dorongan semangat kejuangan untuk merdeka. Berbahagialah bangsa Indonesia, karena sejak itu telah mempunyai bendera kebangsaan Sang Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa persatuan Bahasa Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Semua itu menjadi perekat persatuan dan rasa kebangsaan yang tinggi (Soeyono dan Nurliana, 2003:77).

Dalam tahun 1942-1945, semasa berkecamuknya Perang Dunia II, Jepang menjajah Indonesia. Penjajahan Jepang ini mempunyai dua sisi yang bertolak belakang; di satu sisi mengakibatkan penderitaan, namun di sisi lain memberi peluang bagi rakyat dan pemuda memasuki berbagai organisasi militer yang dimanfaatkan sebagai sarana menyusun kekuatan melalui prajurit sukarela Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Jiwa, semangat merdeka, kesadaran berbangsa dan kebangsaan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan, kesadaran anti-penjajahan, nasionalisme, dan patriotisme semakin digelorakan.

Melengkapi perjuangan bersenjata, maka Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengutarakan pokok-pokok pikirannya tentang dasar falsafah bangsa dan negara, yang dinamakan Pancasila, yang sebelumnya didahului pandangan-pandangan para tokoh pendiri negara lainnya. Dapat disimpulkan, periode perjuangan antara kebangkitan nasional dengan akhir pendudukan Jepang merupakan masa persiapan kemerdekaan (Soeyono dan Nurliana, 2003:78).

Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa tercapai dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Lalu, pada 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Berkibarnya sang Merah Putih, bergemanya lagu Indonesia Raya di seluruh pelosok tanah air, menandai kemerdekaan bangsa dan kedaulatan rakyat. Namun, lahirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari Belanda yang ingin menjajah kembali. Maka mulailah perjuangan yang dahsyat di segala bidang, terutama perjuangan bersenjata, perjuangan politik, dan diplomasi. Dalam periode ini jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul dan berkembang pada masa-masa sebelumnya, menjadi bekal, landasan, dan daya dorong mental spiritual yang tangguh dalam perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan (Soeyono dan Nurliana, 2003:83).

Perjuangan bersenjata maupun perjuangan politik dan diplomasi melahirkan nilai-nilai yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang telah tumbuh sebelumnya, seperti rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, percaya pada diri dan kemampuan sendiri, percaya pada hari depan yang gemilang, idealisme kejuangan yang tinggi, semangat berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara; "*sepi ing pamrih rame ing gawe*", nasionalisme, patriotisme, jiwa kepahlawanan, rasa setia kawan, senasib dan sepenanggungan, rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, semangat tak kenal menyerah dan pantang mundur. Jiwa merdeka menjadi semangat merdeka yang semakin menggelora dan merupakan motivasi perjuangan yang kuat (Soeyono dan Nurliana, 2003:88).

Nilai kejuangan yang dilakukan oleh Bung Karno adalah nilai kejuangan yang melandasi perjuangan bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila dan UUD 45 yang menggambarkan daya dorong perlawanan untuk bebas dari penjajahan, berupa upaya dari generasi ke generasi untuk mencapai kemerdekaan, Oleh karena itu dalam sepak terjangnya Bung Karno lebih mementingkan Pematangan Nasionalisme, pidatonya yang berapi-api seperti istilah berdikari '*Go To hell with Your Aid*'. Seolah mengajak bangsanya untuk percaya pada kemampuan diri sendiri Sebagai bangsa yang baru merdeka picuan semangat seperti itu memang dibutuhkan. Bung Karno terjebak dengan ulah para pembantunya yang mengarahkan beliau untuk menjadi Presiden seumur hidup. Hal ini tidak dapat diterima rakyat karena menyalahi sila Keadilan dalam Pancasila. Pada masa perjuangan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, maka jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang merupakan landasan dan daya dorong mental-spiritual yang kuat dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap perjuangan, diharapkan menjadi pegangan segenap warga bangsa, sebagai nilai-nilai kejuangan yang lestari dan membudaya.

2.4. Pidato Bung Karno

2.4.1 Pengertian Pidato

Kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat serta memanfaatkan aspek-aspek non kebahasaan (ekspresi, gestur, kontak pandang, dan lain-lain.) yang mendukung efisiensi dan efektivitas pengungkapan gagasan kepada orang banyak pada suatu acara tertentu (Sundusiah, 2012:22).

Contoh pidato yaitu, seperti pidato kenegaraan, pidato kenegaraan ini dilakukan oleh pejabat Negara dalam hari dan waktu dan tempat yang sakral, resmi serta penuh protokoler. Pidato menyambut hari besar, pidato yang dilakukan oleh pejabat Negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau lembaga tertentu dalam rangka memperingati hari-hari besar yang dihormati, misalnya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1960, peringatan maulud Nabi, kenaikan Isa Al Masih. Pidato pembangkit semangat, seperti yang dilakukan oleh Bung Karno ketika melakukan perlawanan penjajah, Bung Tomo pada 10 November di Surabaya dan lain-lain. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan publik / umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik.

2.4.2. Tujuan Pidato

Pidato pada umumnya bertujuan untuk:

- a. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan suka rela.

Beberapa teknik-teknik persuasif dilihat dari khalayaknya:

1. Ada khalayak tak sadar adanya masalah. Kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tahap perhatian. Khalayak dibangkitkan minatnya, dikemukakan fakta dan angka yang mengejutkan mereka.
 - b. Tahap kebutuhan. Sajikan sejumlah fakta, angka dan kutipan yang ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa memang ada masalah. Sebutkan dengan khusus bagaimana situasi yang memengaruhi ketentraman, kebahagiaan, atau kesejahteraan pendengar.

- c. Tahap pemuasan, visualisasi, dan tindakan. Dalam pengembangan tahap-tahap itu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk memperkenalkan bahan-bahanyang lebih faktual untuk menegaskan masalah. Sebutkan kembali bahan-bahan yang lebih faktual tersebut saat membuat ikhtisar akhir sekaligus mengimbau mereka untuk meyakini dan mengikutinya.
 2. Khalayak apatis (masa bodoh). Berbeda bagi mereka yang tidak sadar dengan adanya masalah, tahap ini untuk mengantisipasi khalayak yang mengetahui masalahnya, tetapi mereka peduli, karena merasa bukan urusannya. Pembicara, harus meyakinkan mereka bahwa masalah yang mereka ketahui, akan memengaruhi mereka.
 3. Khalayak yang tertarik tetapi ragu. Sebagian khalayak tahu dan sadar adanya masalah, tetapi mereka belum mengambil keputusan karena masih meragukan keyakinan yang akan diikuti atau tindakan yang akan dijalankan. Contoh tadi, masalah sampah yang dapat diolah menjadi kompos/pupuk non kimia. Untuk meyakinkan khalayak,
 4. Khalayak yang bermusuhan. Adakalanya khalayak sadar bahwa masalah yang harus diatasi, tetapi mereka menentang usulan yang Anda ajukan. Pertentangan bisa terjadi karena takut akan akibat yang tidak dikehendaki atau lebih menyukai alternatif lain daripada apa yang ditawarkan.
- b. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain.
- Tujuan untuk menyampaikn informasi, agar audiens diharapkan mengetahui, mengerti dan menerima informasi itu. Jenis pidato ini merupakan upaya untuk menanamkan pengertian. Karena secara keseluruhan pidato informatif harus

jasas, logis dan sistematis. Penyusun pesan. Menurut teori Monroe, yang diungkap Jalaludin Rakhmat (2000:45) pidato informatif mempunyai 3 tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Perhatian: Ada 4 hal yang harus diperhatikan, menarik perhatian; menunjukkan topik; menghubungkan topik dengan pendengar dengan membangun kredibilitas, dan menjelaskan susunan pembicaraan (semacam daftar acara)
 - 2) Tahap Kebutuhan: Ada 4 cara yaitu, pernyataan –bagaimana audiens lebih banyak tahu tentang pokok bahasan; Ilustrasi-berikan beberapa contoh yang menonjol kebutuhan pendengar; penegasan-sajikan fakta, angka dan kutipan tambahan untuk lebih meyakinkan pendengar; penunjukkan-pokok pembicaraan berkaitan dengan kepentingan, kesejahteraan dan keberhasilan khalayak.
 - 3) Tahap Pemuasan: Anda menyampaikan informasi itu sendiri. Misalnya, menjelaskan keterampilan berpidato. Tahap ini dibagi dalam 3 bagian: Ikhtisar pendahuluan- Anda menyebutkan pokok-pokok pembicaraan satu demi satu. Tujuannya adalah membantu khalayak memperoleh gambaran menyeluruh tentang isi pembicaraan.
- c. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Pidato rekreatif tidak selamanya menghasilkan humor sehingga orang tertawa. Apakah hanya mengeluarkan unek-unek atau hanya sekadar penghibur untuk melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Ada kesepakatan bahwa lebih baik menentang status quo dengan humor-humor ketimbang dengan senjata. Tampaknya ada

hubungan erat antara keterbukaan humor dengan tingkat demokrasi. Makin lepas orang berhumor, makin demokratis negeri itu.

2.4.3 Pidato Bung Karno Menurut Perspektif Ahli Sejarah

Salah satu daya tarik sekaligus kekuatan Presiden Soekarno terletak pada kemampuannya berpidato. Pada zamannya, orang rela berdesakan demi mendengarkan pidato sang Pemimpin Besar yang disiarkan radio. Ribuan rakyat selalu antusias menghadiri rapat raksasa yang menampilkan orasi Bung Karno. Ketika komunikasi lisan lebih populer, pidato Bapak Proklamator itu mendapat tempat untuk didengarkan, juga dipatuhi (Soeryadinata, 2012:77), namun, menjelang kejatuhannya, pidato Bung Karno bagai seruan di padang gurun dan suaranya tak lagi terdengar. Penulisan sejarah nasional pun kemudian melupakan pidato Bung Karno sebagai salah satu sumber penting. Menurut Asvi Warman Adam, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pidato Bung Karno itu sangat berharga sebagai sumber sejarah, yang kemudian berbagai hal yang ditutupi, bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru (Soeryadinata, 2012:77).

Bagi bangsa Indonesia, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode 1945-1950 merupakan revolusi yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya maka revolusi adalah pengalaman emosional luar biasa dengan rakyat yang berpartisipasi langsung. Ada sebuah kenangan yang tak terlupakan di benak bangsa Indonesia akan suka duka pada masa revolusi tahun 1945-1950 tersebut. Bahkan bagi para ahli sejarah Indonesia modern, masa-masa tahun 1945-1950 merupakan masa revolusi yang memainkan peranan yang simbolik sebagai wadah

beragam pandangan mengenai masa lampau, masa kini, dan masa depan bangsa ini (Sardiman, 2004:14)

Menurut Asvi, Pidato Bung Karno mengungkapkan banyak persoalan, bagaimanapun, pidato itu data otentik dari seorang presiden, tapi, data itu tidak bisa berdiri sendiri, perlu diperkuat sumber sejarah yang lain. Apa yang disampaikan Soekarno adalah pidatonya sendiri yang kadang bersifat spontan, Menurut Ali, seorang peneliti sejarah, menyatakan bahwa memaknai pidato Bung Karno penting untuk menjadi pembanding dalam memaknai nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Sejarawan Taufik Abdullah menyatakan, "Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, melainkan juga alat legitimasi kekuasaan yang harus dibaca, meskipun tidak harus diterima. Naskah pidato itu harus dibandingkan dengan teks dan kesaksian yang lain. Sejarawan dari Universitas Indonesia, Anhar Gonggong, menilai pidato Bung Karno itu memiliki pengaruh apa bagi perubahan sejarah Indonesia. Sebab, eksistensi Soekarno salah satunya terefleksi dari pidato itu Soekarno (Soeryadinata, 2012:80).

2.5 Tinjauan Tentang Ilmu Pengetahuan Sosial

Pendidikan IPS adalah suatu kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-konsep ketrampilan-ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi (Sardiman, 2006:9). IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya. Adanya

pendidikan IPS diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki ketrampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. Oleh karena itu IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan ” dari pada transfer konsep karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral dan ketrampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya.

2.5.1 Pengertian

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang mempelajari sosial manusia di lingkungan sekitar seperti sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, sejarah, psikologi, geografi (Hafsah, 2012:25)

Secara mendasar, pembelajaran Ilmu Sosial (atau dikenal dengan IPS) berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya; memanfaatkan sumber-daya yang ada dipermukaan bumi; mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat (Taneo 2010 :16). Menurut Taneo (2010:19) dalam bidang pengetahuan sosial, dikenal banyak istilah yang kadang-kadang dapat mengacaukan pemahaman. Istilah tersebut

meliputi Ilmu Sosial (*Sosial Sciences*), Studi Sosial (*Sosial Studies*) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Untuk memperjelas penggunaan istilah tersebut secara tepat dalam uraian berikut :

1. Ilmu Sosial (*Sosial Science*)

Achmad Sanusi memberikan batasan tentang ilmu Sosial (Saidihardjo, 1996:2) sebagai berikut “Ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi yang makin lanjut dan makin ilmiah”. Sedangkan menurut Gross (Djahiri, 1988:1), ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah serta memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk.

Ada bermacam-macam aspek tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, sikap, mental, budaya, dan hubungan sosial. Studi khusus tentang aspek-aspek tingkah laku manusia inilah yang menghasilkan ilmu sosial, seperti ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Jadi setiap bidang keilmuan itu mempelajari salah satu aspek tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Ekonomi mempelajari aspek kebutuhan materi, antropologi mempelajari aspek budaya, sosiologi mempelajari aspek hubungan sosial, psikologi mempelajari aspek kejiwaan, demikian pula bidang keilmuan yang lain. Sedangkan yang menjadi obyek materialnya adalah sama, yaitu manusia sebagai anggota masyarakat.

2. Studi Sosial (*Sosial Studies*)

Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial. Tentang studi sosial ini Samsuri (2009:18) memberikan penjelasan bahwa, studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar. Selanjutnya studi sosial dapat berfungsi sebagai pengantar kepada disiplin ilmu sosial bagi pendidikan lanjutan atau jenjang berikutnya. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan sesuatu referensi dan meninjaunya dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya.

Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa studi sosial lebih memperlihatkan suatu bentuk gabungan ilmu sosial. Tugas studi sosial, sebagai suatu bidang studi mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, adalah membina warga masyarakat yang mampu menyasikan kehidupannya berdasarkan kekuatan-kekuatan fisik dan sosial dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu materi dan metode penyajiannya harus sesuai dengan misi yang diembannya.

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Sardiman (2006:8) memberi batasan IPS bahwa IPS sebagai pendekatan interdisipliner (*Inter-disciplinary approach*) dari pelajaran Ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti

sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau basil pemfusiaan atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan politik. Mata pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, oleh karena itu dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Dengan demikian jelas bahwa IPS adalah fusi dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Pengertian fusi di sini berarti bahwa IPS merupakan suatu bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya, bahwa bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu. Dalam kepustakaan kurikulum pendekatan terpadu tersebut dinamakan pendekatan "*broadfield*". Dengan pendekatan tersebut batas disiplin ilmu menjadi lebur, artinya terjadi sintesis antara beberapa disiplin ilmu.

Dengan demikian sebenarnya IPS berinduk kepada ilmu-ilmu sosial, dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep dan prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial dengan bidang keilmuannya dipergunakan untuk melakukan pendekatan, analisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang dilaksanakan pada pengajaran IPS.

2.5.2 Hakikat IPS dalam Program Pendidikan

Menurut Taneo (2010 :41) A setiap orang sejak lahir, tidak terpisah dari manusia lain, khususnya dari orang tua dan lebih khusus lagi dari ibu yang melahirkannya.

Sejak saat itu si bayi telah melakukan hubungan dengan orang lain, terutama dengan ibunya dan dengan anggota keluarga lainnya. Meskipun masih sepihak, artinya dari orang-orang lebih tua terhadap dirinya hubungan sosial itu telah terjadi. Tanpa hubungan sosial dan bantuan dari anggota keluarga lain, terutama dari ibunya si bayi, si bayi tidak akan berdaya dan tidak mampu berkembang menjadi manusia dewasa. Selanjutnya dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani sesuai dengan penambahan umur serta pengalaman terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya makin berkembang dan meluas. Hal tersebut membutuhkan atau terbina melalui pengetahuan sosial, hanya tentu saja berkenaan dengan namanya, sangat tergantung pada pernah sekolah atau tidak. Sebutan sebagai pengetahuan sosial atau resminya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) baru diketahui secara formal ketika kita bersekolah. Dengan demikian maka Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia serta untuk mempolakan sejauh mana manusia itu berhubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok.

2.6 Penelitian yang Relevan

Penelitian Abdullah (2009) tentang analisis hermeneutik teks pidato Bung Karno dalam perspektif psikologi persuasi menjelaskan bahwa ada sinkronisasi antara pilihan kata dan kalimat yang digunakan Soekarno untuk melakukan bujukan atau ajakan kepada rakyat dalam rangka mengusir penjajah, atau kita sebut proses persuasif. Faktor yang mempengaruhi emosi pembaca, massa ketika mendengarkan atau membaca pidatonya Bung Karno disebabkan oleh berbagai hal sesuai sudut pandang hermeneutika dialektis dan hermeneutika historis.

Penelitian Firmansyah (2011) yang berjudul: “Konstruksi realitas teks pidato Indonesia menggugat tentang imperialisme dan kapitalisme oleh Sukarno Tahun 1930 ditinjau dari analisis wacana kritis” menjelaskan bahwa dimensi teks menunjukkan bahwa Bung Karno seorang orator ulung serta pemakai bahasa yang baik. Setiap pemilihan kata, bahasa maupun kalimat yang dipakai Bung Karno memiliki arti makna yang dalam, tegas dan detil dalam menjelaskan sesuatu. Dimensi kognisi sosial Bung Karno menunjukkan Bung Karno sebagai kaum intelektual, kaum pergerakan, seorang Jawa, seorang yang sangat mencintai tanah air dan rakyatnya, dan seorang yang baik dalam beragama. Dimensi konteks sosial, bahwa wacana yang berkembang dalam masyarakat pada waktu itu merupakan hasil propaganda yang dilakukan pemerintah Belanda dan agitasi yang selama ini dilakukan Bung Karno. Meskipun beraneka ragam wacana yang berkembang pada masyarakat, masyarakat pribumi tetap mendukung Bung Karno sebagai pemimpin mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa paham Imperialisme dan Kapitalisme, paham penyebab terjadinya penjajahan yang ada di muka bumi, bahwa sejarah perjalanan dunia memang mengatakan demikian. Teks Indonesia Menggugat suatu bentuk konsistensi Bung Karno melawan kedua paham itu.

2.7 Kerangka Pikir

Salah satu bentuk kemasan bahasa yang dapat dijadikan media untuk menyampaikan pesan adalah pidato. Dalam konteks sejarah bangsa Indonesia kemampuan pidato Bung Karno telah mampu membuka mata publik tentang kepriawaian Bung Karno dalam beretorika, di dalam pidatonya disamping intonasi,

performance, kewibawannya, pilihan kata, gaya bahasa dan kharisma yang terpancar dari sang Proklamator, dia menuangkan ide-idenya baik di dalam lisan atau tulisan memakai prinsip-prinsip persuasi. Massa tidak hanya tercengang dan taat dengan apa yang dikatakan, akan tetapi selain pilihan katanya yang mampu menyentuh hati masyarakat Indonesia, dia juga sangat pandai membujuk orang lain ke cara berpikirnya (Rahmat, 2004: 11)

Untuk itu penulis tertarik mengkaji kembali pidato atau retorika Bung Karno yang telah mampu menggerakkan jiwa rakyat untuk mengusir penjajah dari Indonesia, sekaligus bagaimana dengan pidato atau kemampuan retorikanya mampu meyakinkan dan mempengaruhi dunia Internasional yang kemudian dengan kemahiran pidato atau retorikanya mampu menghantarkan dirinya membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta mampu menghantarkan dirinya duduk menjadi orang Indonesia nomor satu.

Dalam berkomunikasi tentunya setiap manusia memiliki tujuan. Teknik dan cara orang dalam berkomunikasi pun beragam dalam menyampaikan suatu tujuan, dimana dalam setiap kegiatan komunikasi manusia pasti menyisipkan tujuan-tujuan tertentu pada setiap proses komunikasi, baik itu disadari maupun tidak. Bahkan baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal tujuan komunikasi pun dapat disisipkan pula di dalamnya, turut menjadi tempat penyisipan tujuan komunikasi yang menjelaskan atau menggambarkan terjadinya sebuah peristiwa (Heryanto dalam Sobur, 1999:115)

Materi pidato yang tersusun dan bertujuan untuk memaparkan ide dan pemikiran pembuatnya terbentuk dari motivasi atau kepentingan subjektif

tertentu, baik yang rasional maupun irasional. Terlepas dari apapun motivasi atau kepentingannya, kalimat yang dituturkannya tidaklah dapat dimanipulasi semau-maunya oleh yang bersangkutan. Kalimat itu hanya dibentuk, hanya akan bermakna, selama ia tunduk pada sejumlah aturan gramatika yang berada di luar kemauan, atau kendali pembuat pidato.

Bila mengkaji tentang materi melalui konstruksi makna yang dispesifikasi pada nilai sosial dan nilai kejuangan dengan objek pidato Bung Karno akan tampak disana mengenai seluk beluk dan gambaran faktual tentang kondisi dan situasi pada saat itu yang dapat dikonstruksi dari materi pidato Bung Karno. Bahwasanya bahasa atau susunan kata yang disampaikan dalam pidato tersebut difungsikan untuk mempresentasikan realitas dan digunakan untuk berbagai kepentingan terkait dengan realitas tersebut (Eriyanto, 2009:21)

Dalam dimensi keterampilan berbahasa kontruksi pidato Bung Karno merupakan gambaran bagaimana struktur teks dan strategi yang dipakai dapat menegaskan tema tertentu, untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa yang merupakan dan bentuk kemampuan Bung Karno dalam menulis dan berbicara dari sumber pemikirannya dengan maksud dan tujuan tertentu, menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, menjelaskan gagasan atau peristiwa tertentu. Kemampuan tersebut tidak terlepas dari kemampuan kognitif pada level kognisi sosial dimana pembuat teks memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang ditulisnya.

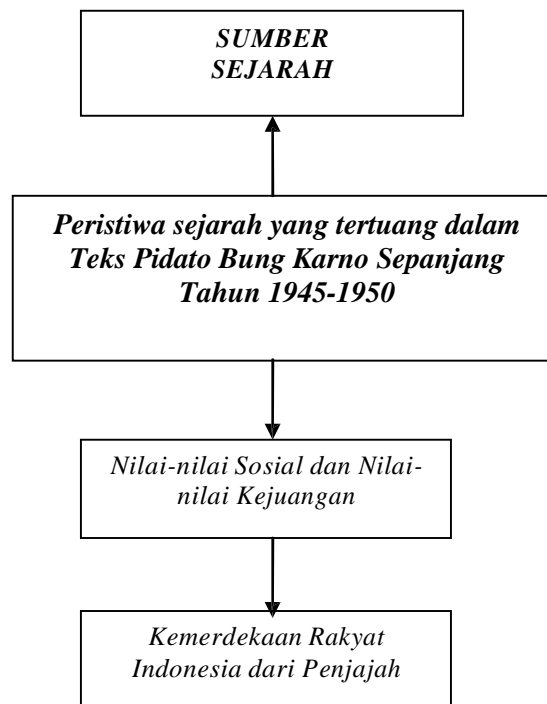
Melihat bagaimana suatu teks dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial maka praktik ini bisa menampilkan ideologi, dapat memproduksi dan

mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, pria dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas dan perbedaan itu dipresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan melalui pemaparan pemikirannya yang tertuang dalam teks pidato. Keadaan yang rasis, seksis, atau ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu *common sense*, suatu kewajaran atau alamiah, dan memang seperti itu keadaannya.

Analisis ini mengukuhkan bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi. Perkembangan teori komunikasi dan budaya yang kritis pada tahun-tahun terakhir ini telah membawa serta perhatian pada ideologi, kesadaran, dan hegemoni. Ideologi adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi, kesadaran adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, dan hegemoni adalah proses di mana ideologi dominan disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial dijalankan. (Lull, dalam Sobur, 2002:61)

Ditinjau dari perspektif sejarah, kemampuan Bung Karno dalam beretorika merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal dari sebuah peristiwa yang telah atau sedang dialami, karena dalam prosesnya penyampaiannya pesan menggunakan bahasa secara lisan atau langsung. Dengan demikian alangkah merupakan suatu kebijaksanaan bahwa upaya menggali ilmu pengetahuan melalui perjalanan seseorang yang telah diakui kecerdasannya di mata dunia, sosok yang dekat dan merupakan pejuang kemerdekaan negara tercinta Indonesia, tidak hanya karena kemampuan ilmu kenegaraannya (politik), tetapi

juga melalui kemampuan retorikanya (tuturan dalam pidato-pidatonya) sebagai Bapak Negara, dan tuturan seperti apa yang mengantarkan sosok Sukarno menjadi orator handal menuntun rakyatnya menggali dasar negara kesatuan Indonesia. Ditinjau dari perspektif komunikasi, pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, karena dalam prosesnya komunikator dalam menyampaikan pesan menggunakan bahasa secara lisan atau langsung dalam menuangkan pendapat, ajakan atau lainnya kepada khalayak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian